

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Demi mencapai tata kelola pemerintahan terstruktur dan terencana dengan tata kelola yang baik, paradigma sistem tata kelola pemerintahan perlu bergeser dari sistem lama ke sistem baru. Semua peraturan kewenangan pemerintah daerah yang mengatur segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dilaksanakan atau dilimpahkan kepada pemerintah pusat berdasarkan prakarsa dan aspirasi rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia sebelum berlakunya sistem otonomi daerah di Indonesia (UU No. 22 Tahun 1999).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab merupakan kunci keberhasilan sistem otonomi daerah. APBD yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah merupakan sistem terpadu yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah (Pasal 4, PP 58 Tahun 2019).

Akuntabilitas keuangan di tingkat daerah mencakup lebih dari sekedar kemampuan kepala daerah untuk menunjukkan bagaimana dana publik digunakan; itu juga mencakup kemampuan untuk menunjukkan bahwa dana publik telah digunakan secara efektif, ekonomis, dan efisien. Istilah "ekonomi" mengacu pada pemilihan dan pemanfaatan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga terendah atau termurah. Yang dimaksud dengan "efektif" adalah

syarat agar anggaran digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran demi kepentingan umum. Sementara “efisien” mengacu pada penggunaan dana masyarakat untuk mencapai hasil yang maksimal (Mardiasmo, 2016:32).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat 3 menyebutkan, Pemerataan pembangunan yang tidak merata yang mengakibatkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi motivasi di balik pelaksanaan otonomi daerah. Kreativitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing juga terhambat oleh campur tangan pemerintah pusat. Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, otonomi daerah mampu memberi berbagai peluang kepada pemerintah untuk mengelola keuangan daerahnya secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kinerja pemerintah juga akan ditunjukkan oleh pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Salah satu dari enam sektor ekonomi terpenting di daerah, Kabupaten Pati terus berekspansi. Keenam sektor perekonomian ini meliputi sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; dan sektor jasa-jasa. Terdapat banyak potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor ekonomi yang menjadi sumber utama APBD di Kabupaten Pati.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau APBD, menunjukkan seberapa efektif keuangan daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan sosial, pengembangan

masyarakat, dan tugas-tugas pemerintah. Tabel 1.1 memberikan gambaran pendapatan daerah yang menjadi sumber utama pendapatan APBD Kabupaten Pati tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

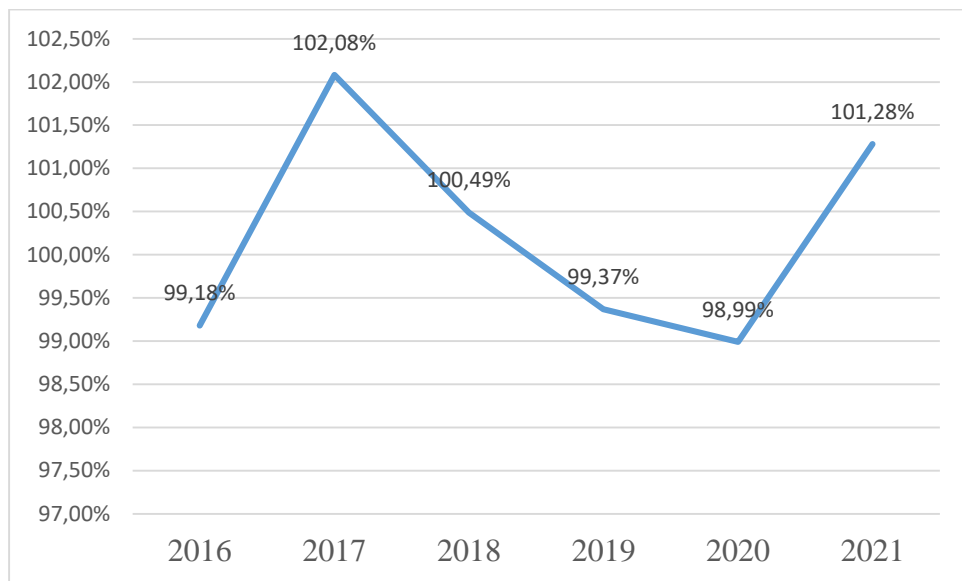
Tabel 1.1.

Target dan LRA Pendapatan Daerah Kabupaten Pati Periode 2016-2021

Tahun	Target Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian %
2016	Rp.2.465.177.234.000	Rp.2.445.063.689.933	99.18
2017	Rp.2.712.776.398.000	Rp.2.769.242.943.472	102.08
2018	Rp.2.775.318.641.000	Rp.2.789.055.859.845	100.49
2019	Rp.2.856.879.730.000	Rp.2.383.881.365.181	99.37
2020	Rp.2.689.464.737.000	Rp.2.662.375.437.006	98.99
2021	Rp.2.690.806.167.000	Rp.2.725.202.350.660	101.28

Sumber: BPKAD Kabupaten Pati, diolah (2023)

Berdasarkan data laporan kinerja APBD 2016-2021 yang dirilis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati. Pada tahun 2016, 2019 dan 2020, data tersebut memperlihatkan persentase kinerja pencapaian pendapatan daerah tidak mencapai target APBD, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tidak mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan APBD dengan persentase pencapaian sebesar (99,18%); (99,37%); dan (98,99%), sedangkan pada tahun 2017, 2018 dan 2021 angka kinerja pendapatan daerah semuanya berada di atas angka target anggaran, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk tahun tersebut mampu mencapai target pendapatan yaitu dengan persentase pencapaian (102,08%), (100,49%) dan (101,28%).



Gambar 1.1.

LRA Pendapatan Kabupaten Pati Periode 2016-2021

Sumber : Data yang sudah diolah (2023)

Data persentase kinerja pendapatan daerah Kabupaten Pati dari tahun 2016 hingga tahun 2021 menunjukkan fluktuatif. dimana kinerja pendapatan daerah yang tidak stabil naik atau turun. Namun persentaserealisasi pendapatan daerah yang mengalami penurunan tidak jauh dari nilai yang dianggarkan. Selain dapat meningkatkan persentaserealisasi pendapatan daerah, hal ini akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah diidentifikasi dan dilaksanakan merupakan salah satu metode untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Rasio keuangan yang berbeda, seperti rasio pertumbuhan, rasio efisiensi dan efektivitas, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio keselarasan, dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah (Halim dan Kusufi, 2012: 230).

Analisis rasio keuangan belum banyak digunakan dalam sektor publik, seperti dalam pemerintah daerah, berbeda dengan sektor swasta yang banyak melakukan penelitian. Hal ini disebabkan terbatasnya pelaporan keuangan yang disediakan oleh entitas pemerintah daerah yang sifat dan ruang lingkupnya berbeda dengan organisasi swasta seperti korporasi. Sebagai ukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, keberhasilan APBD lebih dinilai dari segi pencapaian tujuan, sehingga kurang memperhatikan perubahan komposisi atau struktur APBD (Mulya, 2018: 4).

Trianto (2018) dalam penelitiannya yaitu analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang. menguraikan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah Kota Palembang mencapai tingkat efektif dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang telah berhasil merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan sebelumnya, memaksimalkan potensi PAD untuk mendukung pembangunan di Kota Palembang.

Penelitian terdahulu oleh Kurniawati (2022) melakukan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dimana mengacu pada rasio desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan dalam mengevaluasi kinerja keuangan. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata rasio desentralisasi baik sebesar 44,7%, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi sebesar 52,42 persen, rasio kemandirian keuangan sebesar 86,36 persen

dalam kategori memiliki kemampuan tinggi, rasio efektivitas sebesar 96,3% dalam kategori cukup efektif, rasio efisiensi sebesar 100,56% dalam kategori tidak efisien, rasio pertumbuhan dibagi menjadi rasio pertumbuhan PAD sebesar 4,34 persen dalam kondisi fluktuatif dan rasio pertumbuhan transfer sebesar 1 persen, dan kesesuaian Fakta bahwa daerah pemerintah tidak memanfaatkan peluang yang ada dan masyarakat umum masih belum sadar akan pentingnya membayar pajak dan retribusi menjadi kendala.

Fathah (2017) menggunakan analisis rasio efisiensi PAD, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio keserasian dalam kajiannya terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan rasio efisiensi PAD, kinerja keuangan daerah Kabupaten Gunung Kidul dikategorikan efisien karena rata-rata efisiensinya lebih besar dari 100% atau 131,8%. Hasil analisis menunjukkan rasio efisiensi keuangan daerah tidak efektif karena skalanya lebih besar dari 100 % selama lima tahun berturut-turut. Dilihat dari tingkat kemandirian keuangan di daerah masih sangat rendah dan termasuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Seperti yang ditunjukkan oleh rasio keserasian, masih banyak mengalokasikan dananya untuk belana operasi daripada belanja modal.

Hasil penelitian tersebut di atas mengungkapkan bahwa hasil pencarian bervariasi menurut daerah, yang mendorong peneliti untuk meneliti kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pati dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil subyek di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk mengukur kinerja keuangan daerah agar mampu mengelola perekonomian secara transparan dan akuntabel melalui organisasi BPKAD daerah

berperan sebagai pengatur keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Pati. Berdasarkan uraian konteks di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI TINGKAT KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI PERIODE 2016-2021.**

1.2. Ruang Lingkup

Pemilihan judul penulis gunakan untuk menentukan ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, seperti berikut ini, agar pembahasan penelitian lebih terarah dan lancar:

1. Objek penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sebagai badan yang mengeluarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama enam tahun berturut-turut periode 2016 sampai 2021.
2. Penelitian ini membahas mengenai penilaian tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
3. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan lima rasio keuangan daerah yaitu, rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.
4. Penelitian ini akan diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan setelah proposal disetujui.

1.3. Perumusan Masalah

Penggunaan analisis rasio keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa setiap daerah memiliki kinerja keuangan yang

tidak sama. berdasarkan beberapa jurnal penelitian yang menjadi referensi penulis. Mengingat fenomena bisnis yang dibahas di bagian latar belakang, adanya permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yaitu perolehan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak stabil (*fluktuatif*) dari tahun ke tahun, serta belum adanya evaluasi dan pengukuran kinerja keuangan yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati berdasarkan dari analisis rasio kemandirian keuangan daerah?
2. Bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati berasarkan dari analisis rasio efektivitas PAD?
3. Bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati berasarkan dari analisis rasio efisiensi keuangan daerah?
4. Bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati berasarkan dari analisis rasio pertumbuhan?
5. Bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati berasarkan dari analisis rasio keserasian?

1.4. Tujuan Penelitian

Merujuk pada beberapa masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah.

2. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati jika dilihat dari rasio efektifitas PAD.
3. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah.
4. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati jika dilihat dari rasio pertumbuhan.
5. Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati jika dilihat dari rasio keserasian.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pada BKPAD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati ditinjau dari teori rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi terkait, temuan studi ini diharapkan dapat menjadi sumber atau titik awal bagi pemerintah daerah dalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan efisiensi keuangan dan efektivitas peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah di berbagai bidang.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya tentang kinerja keuangan pemerintah.